



Pengajaran Sastra dan Politik Kebudayaan

Aprinus Salam *)

*) Penulis adalah Magister Humaniora (M.Hum.), Pengajar Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta, dan kini sedang menunggu ujian kelulusan program Doktor di UGM pula.

Abstract: High school textbooks on literary facing serious problem, namely its curriculum didn't have clear paradigm and political-cultural basis. Its content is still subjectively-based on writer taste and still circling on technical matter. Therefore, literary lesson look like structural and cognitive memorizing. Old assumption that literary is a matter of "esthetical art" that haven't connection with life reality is still dominant. Lesson content like this should be changed, by formulate or identifying several cultural problems in Indonesia. Based on that formulation and problems identification, literary lesson's contents packed to understand culture problems in Indonesia, therefore learning literary not only literary itself, but also become a textual ideological strategy that having vision and mission to developing Indonesia. **Keywords:** *High school textbooks, literary, paradigm, political-cultural basis.*

Sastra dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia

Sangat banyak buku pelajaran sastra yang dititipkan ke dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. Hal itu memang perlu dipersoalkan mengingat aspek-aspek persoalan bahasa Indonesia dan aspek kesusastraan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan tersebut terutama terletak pada materi, tujuan, dan kepentingan pembelajaran. Sebetulnya, tidak ada alasan yang cukup mendasar ketika pelajaran kesusastraan "dicampur" ke dalam materi buku pelajaran bahasa Indonesia. Kebijakan makro dari negara tidak menempatkan materi pengajaran kesusastraan sebagai sesuatu yang perlu berdiri sendiri, tampaknya perlu ditinjau ulang. Di samping itu, kemandirian dan kreativitas sekolah untuk menentukan kurikulum masih merupakan persoalan serius yang harus selalu dievaluasi, dan disesuaikan dengan kemajuan dan perubahan zaman.

Berdasarkan hasil pengamatan, tampaknya materi pelajaran sastra yang dititipkan ke dalam buku pelajaran bahasa Indonesia itu, secara umum dalam koridor dan paradigma yang sama. Hal itu dapat diketahui dari buku pelajaran *Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia untuk SMP dan MTs Kelas VII-IX* (Agus Trianto, 2006); *Bahasa dan Sastra Indonesia* (Pardimin, 2005), *Bahasa Indonesia* untuk kelas VII-IX (Nurhadi, Dawud, Yuni Pratiwi, 2007); *Bahasa Indonesia SMP* (Alex Suryanto, Anita Verly, 2004); *Belajar Berbahasa Indonesia* untuk SMP kelas VII – IX (Frans Asisi Datang, Aah Hilyati, 2004); *Aku Mampu Berbahasa dan Bersastra Indonesia* (Joko Santoso, Anwar Efendi, Teguh Setiawan, Kastam Syamsi: 2007), dan sebagainya. Buku-buku pelajaran tersebut berkelanjutan dari SMP hingga SMA.

Secara umum hal-hal kesusastraan yang dijadikan materi antara lain (1) tentang seluk beluk pantun, (2) membaca, memahami, dan berkreasi tentang cerita anak, puisi, dongeng (atau cerita rakyat), cerpen; (3) membaca, memahami, memaknai/berkreasi tentang novel remaja Indonesia dan novel



terjemahan, (4) mengapresiasi, menanggapi, dan “berlatih” pementasan drama, (5) membaca dan menganalisis novel sastra Indonesia, (6) musikalisasi puisi, (7) membaca dan membandingkan sastra lama (sastra Melayu Klasik) dan sastra modern, (8) perbandingan antara novel dan teks drama, (9) menulis resensi novel (dan novel populer), dan (10) perkembangan sastra Indonesia (hingga angkatan ‘60-an).

Dari berbagai judul yang ada, tampaknya buku pelajaran kesusastraan itu banyak. Akan tetapi, boleh dikatakan bahwa antara satu buku pelajaran dan buku yang lain memiliki kesamaan, hanya urutan penempatan dan kategori penjudulan bab yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang mengambil kategori sosiologis sebagai judul bab, atau yang mengambil substansi masalah sebagai judul bab, atau ada yang menulis bab begitu saja. Selain itu, ada pula yang mengambil peristiwa tertentu sebagai judul bab. Akan tetapi, secara substansial paradigma pelajaran mengarah kepada hal-hal yang bersifat penguasaan teknis dan pengenalan konsep-konsep (aspek kognisi) yang dianggap sudah baku.

Itulah sebabnya pelajaran sastra menjadi tidak menarik. Siswa dijejali informasi “teknis” yang mungkin “tidak berguna” bagi hidupnya dengan kisah-kisah kesusastraan yang sudah basi karena sesuatu yang jauh dari hidup mereka. Kondisi itu diperburuk ketika banyak guru sastra di SMP dan SMA tidak menguasai materi kesusastraan secara baik. Hal itu disebabkan kebanyakan dari mereka lebih sebagai guru bahasa daripada guru sastra. Di samping itu, keterbatasan penguasaan teoretik kesusastraan secara lebih mutakhir pun menjadi penyebabnya.

Terdapat satu atau dua buku pelajaran di atas yang mencoba memasukkan konteks. Konteks yang dimaksud adalah mencoba memasukkan materi pelajaran kepada hal-hal yang secara aktual terjadi dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, ketersediaan dan penyediaan konteks tersebut menjadi setengah hati karena tiga hal. *Pertama*, penulis masih mengikuti, atau belum mampu keluar dari *mainstream* buku-buku pelajaran sastra pada umumnya. Artinya, penulis buku cenderung tidak melakukan eksplorasi teknis dan teoretis dalam menulis buku pelajaran. Kecenderungan untuk melakukan *copy paste* (bukan saja dalam pengertian teknis, tetapi juga dalam pengertian konsep) masih merupakan “momok” yang belum sepenuhnya bisa dihindari.

Kedua, hal ini juga masih berkaitan dengan dominasi *mainstream* definisi sastra dalam pengertian struktural yang tidak begitu memperhatikan konteks sehingga buku pelajaran sastra tidak lebih menjadi hafalan “struktural (-kognitif)”. Dalam paradigma tersebut, ketika siswa mempelajari sastra, pengertian, pemahaman, dan pengetahuan siswa menjadi sesuatu yang bersifat intrinsik kesusastraan, seperti tema, penokohan, latar, alur, gaya bahasa, sudut pandang penceritaan, dan hal seperti itu. Oleh karena terlepas dari konteks, siswa menjadi “tidak mengerti” untuk apa hal tersebut dipelajari.

Terdapat beberapa “kesimpulan” struktural yang mengarah ke sesuatu yang bersifat sosiologis. Misalnya, novel-novel modern awal pada tahun 1920-an hingga 1930-an bertemakan tentang kawin paksa dan subordinasi wanita dalam budaya patriarki, atau masalah pertentangan paham kaum muda yang progresif dan kaum tua yang *status quo*. Akan tetapi, pemahaman tersebut tidak diletakkan dalam satu konteks masalah dan strategi politik kebudayaan. Masalah tersebut dibiarkan sebagai masalah masa



lalu yang berbeda dengan masalah sekarang. Kesimpulan itu berubah menjadi sebuah hafalan sehingga karya sastra tidak lebih hanya sebagai bahan dan beban ujian yang perlu diketahui sebagai syarat kelulusan.

Ketiga, ada anggapan bahwa siswa tidak perlu dibebani “pengetahuan” yang belum waktunya. Anggapan lain bahwa siswa selayaknya diperkenalkan sesuai dengan dunia atau umurnya. Hal itu terlihat berdasarkan pilihan terhadap materi cerita anak dan cerita remaja. Anggapan ini tentu saja layak dipertanyakan kembali mengingat batas antara pengetahuan yang dianggap sesuai untuk usia muda dan usia tua sesungguhnya sangat kabur, dan tidak meyakinkan. Di samping itu, pilihan terhadap teks sastra yang sesuai dengan “usia muda”, seperti memahami cerita anak atau cerita remaja tersebut, secara kualitatif menjadi tidak tersedia dengan memadai.

Oleh karena berbagai persoalan pertama, kedua, dan ketiga tersebut, hal mendasar yang menyebabkan buku pelajaran sastra menjadi seperti di atas, dapat dikatakan bahwa buku pelajaran sastra (untuk SMP dan SMA) secara umum tidak memiliki landasan politik kebudayaan yang cukup jelas. Hal yang dimaksud dengan landasan politik kebudayaan bahwa buku pelajaran sastra tidak ditulis dalam parameter, dan koridor visi dan misi membangun masa depan kebudayaan Indonesia, secara tekstual dan ideologis, tidak memiliki basis tujuan yang jelas, selain keterjebakan terhadap *mainstream* atau hal-hal yang telah tersedia secara tekstual dan konseptual, atau “begitulah kesusastraan diajarkan”.

Itulah sebabnya, selayaknya buku-buku pelajaran (khususnya sastra) ditulis dalam perspektif dan penguasaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan penguasaan terhadap masalah yang dihadapi bangsa dan negara itu, karya sastra dirancang dalam satu strategi yang mengondisikan siswa terlibat dengan persoalan bangsa dan negara. Dengan demikian, penguasaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, konsep-konsep teoretik dan alternatif-solusi dalam ikut membantu mengatasi persoalan tersebut, dalam pengertian minimal perlu dikuasai oleh para penulis buku sastra. Penguasaan minimal terhadap masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia itulah yang akan membawa dan memasukkan persoalan kesusastraan ke dalam konteks yang lebih relevan.

Mempertanyakan Kembali Definisi Sastra

Hal awal yang perlu dipahami untuk memberikan perspektif politik kebudayaan dalam membangun masa depan Indonesia adalah “kembali merumuskan” apa itu sastra? Hal ini seolah mengulang “pekerjaan lama” yang dianggap sudah selesai sehingga terkesan pekerjaan mempertanyakan kembali sesuatu yang dianggap “final” seperti sudah ketinggalan. Padahal, berbagai definisi, pengertian, konsep-konsep, selayaknya selalu dikaji ulang mengingat terjadinya berbagai perubahan dalam hal konteks, situasi, dan arah perubahan (masyarakat Indonesia) itu sendiri. Apalagi mengingat Indonesia mengalami berbagai perubahan dengan cepat, baik dalam ranah sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan terutama politik. Mempelajari sesuatu dengan mengabaikan konteks, maka pelajaran itu akan kehilangan relevansi dan maknanya.



Dulu, karya sastra modern Indonesia, khususnya zaman Balai Pustaka (1920-an), dan hingga tahun 1960-an, novel, cerpen, drama selalu dibayangkan sebagai sebuah karya seni imajinatif, dan sesuatu defamiliarisasi terhadap kehidupan. Sastra dianggap sebagai hiburan yang mendidik (*dulce et utile*) sehingga sastra tidak dijadikan “bahan” memahami persoalan-persoalan masyarakat. Posisi puisi dirasakan lebih parah ketika puisi dianggap sebagai “permainan kata-kata pilihan yang indah dan asing” sehingga seseorang yang mempelajari dan mencintai puisi dianggap sebagai kemewahan yang mengada-ada. Puisi hanya pekerjaan orang “iseng” yang kurang pekerjaan, atau seperti remaja yang sedang jatuh cinta.

Pada tahun-tahun berikutnya, kajian sastra dalam paradigma struktural merupakan kajian dan perspektif yang dianggap aman karena paradigma teoretik itu justru menghindari konteks. Dalam hal ini, konteks yang dimaksud adalah kekuasaan dan negara Orde Baru. Kita tahu, pada waktu kekuasaan Orde Baru demikian kuat berkuasa, ilmu-ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu-ilmu humaniora dan sastra khususnya, “tidak diperkenankan” mempelajari atau mengapresiasi kesusastraan dalam perspektif sosial dan politik, atau secara khusus lagi dalam perspektif sosiologi Marxist.¹

Hal itu dikarenakan teori ini secara khusus akan berpengaruh terhadap pendefinisian karya sastra, yakni ketika karya sastra tidak didefinisikan dalam paradigma struktural, tetapi lebih ditempatkan sebagai satu praktik sosial-ideologis. Dalam konsep ini, hal yang ingin ditekankan adalah *pertama*, ideologi merepresentasikan hubungan-hubungan imajiner antara individu dengan kondisi-kondisi keberadaannya. *Kedua*, ideologi itu pada dasarnya bersifat material, tidak bersifat ideal atau spiritual.²

Teks (sastra) sebagai produk *superstructure* secara relatif tidak bergantung dengan *base structure*, teks memiliki otonomi relatif. Althusser menyebutkan bahwa teks sastra tidak lain adalah wacana ketaksadaran (*unconsciousness*) ideologis itu sendiri. Teks sastra merupakan transformasi dari proses tawar-menawar kehidupan individual dalam formasi sosial yang terjadi secara imajinari.³ Teks sastra sebagai praktik sosial terjadi berkat dan dalam ideologi.⁴ Dengan demikian, ideologi diartikan sebagai praktik-praktik yang dipercaya dan diyakini saling berhubungan dengan praktik, dan struktur kekuasaan tempat manusia tersebut hidup.⁵

Sebagai satu praksis sosial-ideologis, karya sastra diletakkan dalam satu kerangka representasi-representasi tentang dan dalam kehidupan. Teori ini memiliki dan memberikan kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah stagnasi, tradisi, konflik dalam masyarakat, dan bagaimana praktik kekuasaan (politik) dioperasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori ini juga memberikan perhatian bagaimana “membongkar” karya sastra sebagai bagian dan satu hegemoni kekuasaan sehingga masalah “apa yang dikeluarkan (eksklusi)” dan “apa yang dimasukkan (inklusi)” sebuah karya sastra secara langsung berhubungan dengan konteks sosial dan politik masyarakat, yakni tempat karya sastra tersebut hadir.⁶

Perspektif paradigma teoretik yang diambil ikut menentukan bagaimana karya sastra didefinisikan. Alternatif pemilihan terhadap pendefinisian yang bersifat sosiologi Marxist di atas merupakan salah satu pilihan karena pilihan lain pun dapat diambil. Hal yang perlu diperhatikan adalah relevansi perspektif



paradigma teoretik tersebut dalam hubungannya dengan kondisi sosiologis, historis, dan kultural bangsa Indonesia. Contoh lain yaitu teori feminis atau poskolonial memiliki pengertian lain yang berbeda tentang karya sastra dibanding dengan teori sosiologi Marxist. Bisa saja suatu buku pelajaran sastra memberikan tekanan pada paradigma teoretik tertentu dalam membangun kerangka berpikir buku ajarnya sehingga berimplikasi terhadap perbedaan “definisi sastra”. Implikasi tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap pilihan materi karya sastra yang diajarkan.

Dengan demikian, persoalan dalam pengajaran sastra adalah visi dan misi apa yang akan diembankan dalam sebuah buku pelajaran sastra. Pada tataran mikro, visi dan misi tersebut akan ikut menentukan strategi dalam merancang buku ajar. Pada tingkat makro, strategi buku ajar tersebut menentukan strategi politik kebudayaan yang dipersiapkan dalam mengondisikan siswa dalam mempelajari sastra. Siswa tidak harus mempelajari dalam cara yang sama antara satu buku ajar sastra dengan buku ajar sastra lainnya. Akan tetapi, buku-buku ajar sastra tersebut diberikan dengan cara yang beragam sesuai dengan pilihan perspektif paradigma teori tertentu berdasarkan pilihan politik kebudayaan. Setelah itu, sekolah dibiarkan memilih buku-buku pelajaran sastra yang tersedia secara beragam tersebut.

Merumuskan Persoalan Bangsa dan Implementasi Kurikulum Kesusastraan

Berdasarkan pembicaraan di atas, sudah selayaknya kurikulum sastra tidak semata-mata mengandalkan paradigma struktural, tetapi lebih berdasarkan pilihan-pilihan politis dalam rangka strategi dan politik kebudayaan. Dalam hal ini, pengajaran sastra dapat dijadikan salah satu “pintu” dalam memahami persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Mungkin kita berpikir apakah pengajaran seperti itu tidak terlalu “dini” dan “berat” untuk anak muda Indonesia berumur antara 13 hingga 18 tahun. Pikiran seperti itu mungkin sudah tidak relevan mengingat anak muda Indonesia saat ini seolah “dilepaskan” dari konteks masalah yang dihadapi bangsa dan negara. Di samping itu, ada prasangka menganggap rendah kemampuan pelajar generasi sekarang.

Persoalannya adalah bagaimana merumuskan persoalan bangsa dan negara Indonesia dan dalam rumusan tersebut diorientasikan untuk mengembangkan kebudayaan? Bagaimana memprioritaskan masalah tersebut sehingga kita tahu mana agenda masalah yang mendesak dan mana yang kurang mendesak? Untuk itu kondisi-kondisi dan kenyataan-kenyataan umum yang terjadi dalam bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia layak dicermati secara lebih seksama. Setelah itu, formulasi terhadap kondisi-kondisi dan kenyataan umum tersebut dijadikan landasan dalam menentukan pilihan strategi dan politik kebudayaan, khususnya dalam menentukan kurikulum pelajaran kesusastraan.

Kita telah melewati berbagai rezim sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Pada masa kolonial, negara sepenuhnya dalam kendali pemerintah kolonial. Hal utama yang dianggap paling mendesak pada masa itu adalah cita-cita dan gerakan kemerdekaan. Dalam lingkup yang lebih terpadu, cita-cita dan gerakan kemerdekaan tersebut disemangati oleh energi nasionalisme (kebangsaan) dan pencarian identitas kebudayaan. Energi nasionalisme tentu terkondisi dengan sendirinya ketika bangsa Indonesia



merasa senasib sepenanggungan untuk melawan penjajah. Sementara itu, upaya pencarian identitas kebudayaan berkaitan dengan pilihan terhadap budaya sendiri (“Timur”), atau pilihan progresif untuk mengadopsi budaya “Barat”.⁷ Dalam strategi politik pilihan terhadap kebudayaan tersebut, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tradisi juga dipertanyakan dan dikritisi secara bersama-sama.

Kesusastraan Indonesia pada masa-masa tersebut juga terlibat secara signifikan. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa sebagian besar pemikir dan pelaku budaya adalah para sastrawan. Novel-novel seperti *Siti Nurbaya*, *Salah Asuhan*, *Layar Terkembang*, dan sebagainya, selayaknya diletakkan dalam konteks dan situasi zaman tersebut. Dengan demikian, analisis-analisis tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan intrinsik kesusastraan yang terlepas dari konteks zaman. Dengan mempelajari kesusastraan pada masa itu, siswa diharapkan memiliki gambaran sosiologis, politis, ekonomi, dan budaya secara lebih komprehensif.

Pada masa Orde Lama (1945-1965), Presiden Soekarno memprioritaskan konsolidasi politik sehingga masalah-masalah ekonomi relatif terbengkalai. Kita tahu, pada masa Orde Lama kehidupan ekonomi memburuk. Ujung dari konsolidasi yang tidak berimbang tersebut adalah peristiwa 1965, yang hingga hari ini menjadi bagian dari trauma sosial dan politik bangsa Indonesia. Akan tetapi, Indonesia baru mengalami kemerdekaan sehingga semangat nasionalisme dianggap masih tinggi. Pada waktu itu, nasionalisme dianggap belum merupakan persoalan. Artinya, dalam situasi tertentu mempelajari sastra secara langsung berarti mempelajari persoalan bangsa dan negara.

Berbeda jika dibandingkan dengan pemerintahan kolonial dan Orde Lama, pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998) negara di bawah kekuasaan Soeharto secara khusus memprioritaskan masalah-masalah pembangunan ekonomi. Cara Soeharto mengendalikan pembangunan ekonomi adalah dengan mengontrol secara sangat ketat kehidupan politik. Asumsinya adalah dengan politik yang stabil, maka pembangunan ekonomi akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi, efek dari gaya kekuasaan Soeharto adalah “mematikan demokrasi”. Dengan memegang monopoli militer dan menguasai partai Golkar (partai yang sangat dominan pada waktu itu), kekuasaan Soeharto nyaris berjalan tanpa kontrol dan pertimbangan.

Dalam sistem kekuasaan yang berjalan tanpa tanding itu, kontrol dan sikap kritis masyarakat menjadi sangat lemah. Negara demikian berkuasa berhadapan dengan rakyat. Akibatnya, praktik bernegara berjalan sewenang-wenang. Dalam situasi itulah, KKN merajalela. Dalam rentang waktu yang panjang, KKN menjadi “kebudayaan” Indonesia, yang hingga hari ini masih kita rasakan sebagai satu persoalan besar masyarakat Indonesia. Pada tahun 1998, kekuasaan Orde Baru yang demikian anker tumbang. Saat ini, kita memiliki kesempatan yang lebih bebas dalam mengevaluasi dan membongkar kekuasaan Orde Baru tersebut dalam sikap dan kajian yang lebih kritis.

Sekarang ini, kita memasuki satu era pasca Orde Baru, yang biasa dikenal masa reformasi. Masalah bangsa dan negara sebagian besar masih merupakan warisan Orde Baru. Hal yang membedakan adalah pada masa reformasi ini kita secara lebih terbuka dapat mengkritisi banyak hal tanpa beban “ketakutan” terhadap kekuasaan. Itulah sebabnya, saat ini sudah waktunya untuk merumuskan dan membuat



langkah-langkah baru, membangun Indonesia berjangka panjang, dengan melakukan berbagai perubahan strategis dan taktis. Politik kebudayaan dalam pengertian makro yang seharusnya dimiliki negara (dan bangsa), dan politik kebudayaan dalam pengertian mikro yang diimplementasikan dalam kurikulum pelajaran kesusastraan selayaknya menjadi bagian dari kerja-kerja kita hari-hari ini bersama para pelajar Indonesia.

Hal yang pasti, walau masyarakat Indonesia tidak lagi dikuasai oleh satu rezim yang otoriter, tetapi dalam era reformasi ini belum banyak kemajuan yang dapat dicapai. Dalam beberapa hal, kehidupan politik demokrasi terkesan lebih berkembang. Akan tetapi, dalam perspektif ekonomi, sosial, dan budaya, negara dan bangsa Indonesia nyaris tidak memperlihatkan perbaikan yang berarti. Hal itu dapat diperlihatkan dengan peningkatan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (tahun 2008 diperkirakan lebih dari 55 juta orang), suatu yang disebabkan harga BBM dan sembako yang terus naik. Di samping itu, konflik sosial, kerusuhan, dan kekerasan masih terjadi di mana-mana.

Banyak wacana, isu, dan pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan berkaitan dengan dengan “cara-cara” mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia itu. Misalnya, wacana-wacana pengembangan masyarakat madani, negara sejahtera, negara adil dan makmur, dan sebagainya. Akan tetapi, menurut hemat penulis, pemikiran yang dikembangkan dalam tulisan Parsudi Suparlan, yang berjudul “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural” perlu dipertimbangkan lebih serius dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, baik kini maupun di masa depan.⁸ Tulisan itu secara konseptual, metodologis, praksis, dan “pragmatis” sangat relevan dalam membangun masyarakat Indonesia yang carut-marut seperti yang kita rasakan dan kita alami bersama ini.

Terlepas dari kemungkinan bahwa pernyataan di atas sebagai pengetahuan umum, selayaknya kesusastraan “diorientasikan” dalam memahami situasi-situasi “kebudayaan” Indonesia warisan Orde Baru tersebut. Paling tidak upaya-upaya dalam memahami problem bangsa dan negara, dalam arti terjadinya pembusukan ekonomi, politik, dan sosial-budaya sebagai akibat praktik kekuasaan otoriter yang diwariskan Orde Baru menjadi salah satu sisi penting dalam mempelajari kesusastraan. Tegasnya, saat ini, kita tidak bisa berpangku tangan dalam ikut menyelesaikan persoalan bangsa. Asumsi bahwa persoalan ekonomi atau politik *biar diurus* mereka yang ahli ekonomi atau politik selayaknya sudah dianggap tidak relevan. Hal itu juga seperti mempertahankan batas-batas tanggung jawab. Padahal, masalah bangsa adalah tanggung jawab kita bersama.

Itulah sebabnya, kurikulum kesusastraan selayaknya dirangcang dalam satu visi dan misi politik kebudayaan. Garin Nugroho menjelaskan bahwa politik kebudayaan adalah salah satu cara implementasi strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan mengandung dua aspek penting bagaikan dua sisi mata uang. *Pertama*, menunjukkan strategi pengelolaan cara bangsa ini berkreasi, berpikir, berperilaku, bertindak, dan bekerja dalam menumbuhkan proses berbangsa. *Kedua*, menunjukkan strategi menumbuhkan nilai keutamaan berbangsa yang menjadi dasar dalam proses membangun itu, seperti nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, profesionalisme, etika, respek, rasa malu, kerja keras, toleransi, cinta tanah air, dan lain sebagainya.⁹



Politik dan strategi kebudayaan yang dirumuskan Garin Nugroho tersebut tentu saja menjadi sangat relevan ketika terdapat sejumlah warisan budaya yang mengalami pembusukan, utamanya karena KKN, yang berimplikasi luas terhadap kondisi bangsa Indonesia yang belakangan ini justru dirasakan semakin miskin. Kondisi itu dapat dilihat berdasarkan harga-harga yang membumbung terus, atau kita bilang “apa-apa mahal”, sementara itu pendapatan mayoritas orang Indonesia tidak memperlihatkan gejala penaikan. Dalam cara apapun dan dalam kesempatan dan kondisi apapun, masalah bangsa ini harus segera kita cari solusi untuk segera mengatasinya.

Endnote

¹ Untuk ulasan yang luas membicarakan hal tersebut lihat Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae (Editors) dalam *Social Science and Power in Indonesia* (2004). Buku bunga rampai yang memuat 12 penulis ini membicarakan posisi ilmu-ilmu sosial di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru.

² Chaterine Besley, *Critical Practice* (London and New York: Methuen, 1980), hal. 58.

³ John Storey, *An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture* (London: Harvester Wheatsheaf, 1993), hal. 111-112; Michael Payne, *Reading Knowledge An Introduction to Barthes, Foucault, and Derrida*. Malden (Massachusetts: Blackwell, 1997), hal. 37-41; Terry Eagleton, *Literary Theory: An Introduction* (Oxford: Basil Blackwell, 1983). hal. 171-172.

⁴ Etienne Balibar dan Pierre Macherey, “On Literature As an Ideological Form”, dalam Robert Young, *Untying The Text: A Post-Structuralist Reader* (London and New York: Routledge and Kegan Paul, 1987), hal. 84.

⁵ Eagleton, *Literari Theory*, hal. 14.

⁶ Michel Foucault, “The Order of Discourse”, dalam Robert Young, *Untying The Text: A Post-Structuralist Reader* (London and New York: Routledge and Kegan Paul, 1987), hal. 48-60; Sara Mills, *Discourse* (London and New York: Routledge, 1995), hal. 63-66.

⁷ Dalam polemik kebudayaan itu, mereka yang terlibat antara lain Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Soetomo, Tjindarbumi, Adinegoro, Poerbatjaraka, dan Ki Hajar Dewantara. Polemik itu terbagi ke dalam dua wacana. *Pertama*, pemilihan orientasi kebudayaan yang cenderung memilih Barat sebagai model pengembangan kebudayaan. Di lain pihak, *kedua*, adalah mereka yang cenderung memilih kembali ke “kebudayaan sendiri” sebagai basis model pengembangan kebudayaan Indonesia. Pembahasan tentang polemik tersebut lihat Koentjaraningrat, Koentjaraningrat. 1982. *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional* (Lembaga Research Kebudayaan Nasional-LIPI, Februari, 1982).

⁸ Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural” dalam www.fisjp.ui.ac.id/antropologi/httpdocs/jurnal/2002/69/10brt3psu69.pdf

⁹ Sri Sultan Hamengkubuwono X, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita* (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 102.

DAFTAR PUSTAKA

Balibar, Etienne dan Pierre Macherey. 1987. “On Literature As an Ideological Form”, dalam Robert Young, *Untying The Text: A Post-Structuralist Reader*. London and New York: Routledge and Kegan Paul.

Belsey, Chaterine. 1980. *Critical Practice*. London and New York: Methuen.

Buwono X, Sri Sultan. 2007. *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*. Jakarta: Gramedia.

Datang, Frans Asisi. Aah Hilyati. 2004. *Belajar Berbahasa Indonesia* (untuk SMP kelas VII – IX). Jakarta: Erlangga.

Eagleton, Terry. 1983. *Literary Theory: An Introduction*. Oxford: Basil Blackwell.



- Foucault, Michel. 1987. "The Order of Discourse", dalam Robert Young, *Untying The Text: A Post-Structuralist Reader*. London and New York: Routledge and Kegan Paul.
- Koentjaraningrat. 1982. *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*. Lembaga Research Kebudayaan Nasional-LIPI, Februari.
- Mihardja, Achdiat K. (ed.) 1986. *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Mills, Sara. 1997. *Discourse*. London and New York: Routledge.
- Nurhadi, Dawud. Yuni Pratiwi. 2007. *Bahasa Indonesia untuk kelas VII – IX*. Jakarta: Erlangga.
- Pardimin. 2005. *Bahasa dan Sastra Indonesia (Untuk SMP/MTs Kelas VII-IX)*. Jakarta: Yudhistira.
- Payne, Michael. 1997. *Reading Knowledge An Introduction to Barthes, Foucault, and Derrida*. Malden, Massachusetts: Blackwell.
- Santoso, Joko dan Anwar Efendi. *Aku Mampu Berbahasa dan Bersastra Indonesia (untuk SMA dan MA kelas X-XII)*. Surabaya: SIC.
- Santoso, Joko., Anwar Efendi, Teguh Setiawan, Kastam Syamsi. 2007. *Aku Mampu Berbahasa dan Bersastra Indonesia (untuk SMP dan MTs kelas VII-IX)*. Surabaya: SIC.
- Storey, John. 1993. *An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Suparlan, Parsudi. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural" dalam www.fisip.ui.ac.id/antropologi/httpdocs/jurnal/2002/69/10brt3psu69.pdf
- Suryanto, Alex. Anita Verly. 2004. *Bahasa Indonesia SMP*. Jakarta: ESIS.
- Trianto, Agus. 2006. *Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia untuk SMP dan MTs Kelas VII-IX*. Jakarta: ESIS.
- Vedi R. Hadiz, Vedi R. dan Daniel Dhakidae (Editors). 2004. *Social Science and Power in Indonesia*. Equinox Publishing & Institute of Southeast Asian Studies.